

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PENDATAAN GARIS KEMISKINAN UNTUK TRANSPARANSI DAN BANTUAN TEPAT SASARAN DI KABUPATEN SUMENEP

Rizki Anantama¹, Mohammad Iqbal Bachtiar², Emon Rifa'I³, Zeinor Rahman⁴, Nurlaily Wulandari⁵, Nita Selvia Rohmayati⁶

¹Universitas Bahaudin Mudhary Madura

Email: iqbalbachtiar@unibamadura.ac.id

²Universitas Bahaudin Mudhary Madura

Email: rizkianantama@unibamadura.ac.id

³Universitas Bahaudin Mudhary Madura

Email: zeinorrahman@unibamadura.ac.id

⁴Universitas Bahaudin Mudhary Madura

Email: n_wulandari999@unibamadura.ac.id

⁵Universitas Bahaudin Mudhary Madura

Email: nita_selvia@unibamadura.ac.id

⁶Universitas Bahaudin Mudhary Madura

Email: emonrifai@unibamadura.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang efektif dalam pendataan garis kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan memastikan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran melalui teknologi berbasis web dan aplikasi Android. Metode pengembangan sistem mengikuti model waterfall yang mencakup tahap pengumpulan kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM ini mampu memfasilitasi pendataan yang lebih akurat, memungkinkan masyarakat untuk memantau status mereka secara langsung, dan meningkatkan kepercayaan terhadap distribusi bantuan. Sistem ini juga dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk administrator, operator dinas, dan masyarakat umum, sehingga memastikan partisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen; Kemiskinan; Bantuan Pemerintah; Sumenep

Abstract

This research aims to design and implement an effective Management Information System (SIM) in collecting poverty line data in Sumenep Regency. This system is designed to increase transparency and ensure targeted distribution of social assistance through web-based technology and Android applications. The system development method follows the waterfall model which includes the stages of requirements gathering, system design, implementation, testing and maintenance. The research results show that this SIM is able to facilitate more accurate data collection, enable people to monitor their status directly, and increase confidence in the distribution of aid. This system can also be accessed by various stakeholders, including administrators, service operators and the general public, thereby ensuring active participation in poverty alleviation.

Keywords: Management Information Systems; Poverty; Government Assistance; Sumenep

Pendahuluan

Tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang banyak digunakan oleh berbagai negara, selain ukuran lain seperti tingkat produksi CO₂, Indeks Kualitas Hidup Fisik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi. Dalam mengatasi kemiskinan tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs), yang disepakati oleh 193 negara pada September 2015 pada komitmen international. Tujuan pertama dari SDGs adalah untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, diakui sebagai masalah utama dalam pembangunan global, dengan target untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan permanen. (Nasution, 2018).

Saat ini, Indonesia adalah negara maju. Oleh sebab itu, masalah penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian prioritas pemerintah dan bagi masyarakat menjadi sebuah pelajaran. Kemiskinan dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam hal pembangunan ekonomi; semakin tinggi angka kemiskinan, semakin kurang berhasil perkembangan ekonomi maupun sebaliknya. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial seperti meningkatnya pekerja seks komersial, pemukiman kumuh, putus sekolah sehingga kebanyakan menjadi anak jalanan, serta tingkat kejahatan

yang meningkat dan lain sebagainya (Lestari & Imaningsih, 2022). Kemiskinan ini terjadi karena adanya keterbatasan manusia dalam hal memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. (Fajri, 2022).

Grafik kemiskinan di Indonesia sejalan dengan yang terjadi di Jawa Timur. Namun, kemiskinan di Jawa Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang menjadi masalah mengingat Jawa Timur berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka kemiskinan di Jawa Timur menempatkannya di posisi ke-20 dari 34 provinsi di Indonesia, juga berada pada tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Pulau Jawa, setelah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (BPS Indonesia, 2023). Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi, di mana hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat dalam hal manfaat pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Sumenep sendiri berada di urutan 36 dari 38 kabupaten di Jawa Timur dan ini menyatakan masih sangat tinggi untuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2020, penduduk miskin di kabupaten Sumenep sebesar 20,18%. Pada tahun 2021, penduduk miskin berada pada presentase 20,51%, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan

sebesar 18,76% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali namun hanya sedikit yaitu sebesar 18,70%, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 17,78% (Jatim.bps.go.id, 2024). Dapat dikatakan data penduduk miskin di kabupaten Sumenep mengalami rata-rata penurunan secara terus menerus namun kabupaten Sumenep masih tetap bertahan di urutan ke 3 paling tinggi tingkat penduduk miskinnya.

Naiknya harga bahan pokok akibat kelangkaan sembako selama pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor peningkatan angka kemiskinan di Sumenep. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, selain beberapa faktor lainnya. Menurut (Prayoga dkk., 2021), upah minimum yang tidak memadai, standar hidup masyarakat yang buruk, peningkatan angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan peluang kerja, serta pendataan kemiskinan yang tidak tepat atau akurat adalah beberapa faktor penyebab kemiskinan.

Proses pendataan yang tidak tepat ini menjadi hal yang sangat fatal, dikarenakan saat dilapangan tim survei yang memvalidasi data tidak jujur dapat menyebabkan kesalahan dalam identifikasi penerima bantuan, mengakibatkan ketidakadilan distribusi bantuan, dan memperburuk kondisi masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas, sehingga pendataan

kemiskinan yang tidak tepat dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang kurang efisien, tidak meratanya bantuan kepada yang benar-benar membutuhkan, dan menghambat upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara efektif.

Untuk dapat mengerti dan memahami statistik kemiskinan yang ditampilkan diperlukan penjelasan. Artinya, tanpa adanya penjelasan dari BPS akan timbul pemaknaan yang berbeda di kalangan pengguna. Pengguna statistik yang merupakan salah satu aktor dalam pengukuran (sebagai responden, regulator, dan lain-lain) hanya dapat melihat angka-angka statistik, tetapi tidak mengerti atau tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka tersebut (Nasution, 2018). Masyarakat miskin tidak punya kekuasaan untuk mengatakan dirinya masuk kategori miskin karena untuk dapat dikategorikan miskin sudah ditentukan batasan kriterianya. Pada saat pelaksanaan pemberian bantuan, masyarakat yang merasa miskin tidak semuanya menerima bantuan. Apabila ditanyakan ke petugas BPS, alasan mereka tidak didata atau tidak menerima bantuan, petugas BPS berdalih bahwa mereka hanya melakukan pendataan, sementara saat pelaksanaan penentuan dan pemberian bantuan tidak terlibat.

Fakta empiris yang ditemukan di Masyarakat ternyata timbul banyak persoalan di antaranya banyak penduduk miskin yang tidak terdata

dengan baik sehingga tidak menerima bantuan. Sehingga persoalan ini memunculkan opini publik berkepanjangan seperti bantuan sosial pemerintah tidak tepat sasaran, bantuan hanya untuk menghabiskan uang negara dan sebagainya (Kabarmadura.id, 2024). Hal ini menjadi perhatian serius untuk segera dituntaskan agar program kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan kepercayaan masyarakat terhadap stakeholder lebih meningkat.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem informasi manajemen dalam pendataan garis kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Dan untuk mengimplementasikan sejauh mana sistem informasi manajemen mampu memastikan ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan sosial di Kabupaten Sumenep

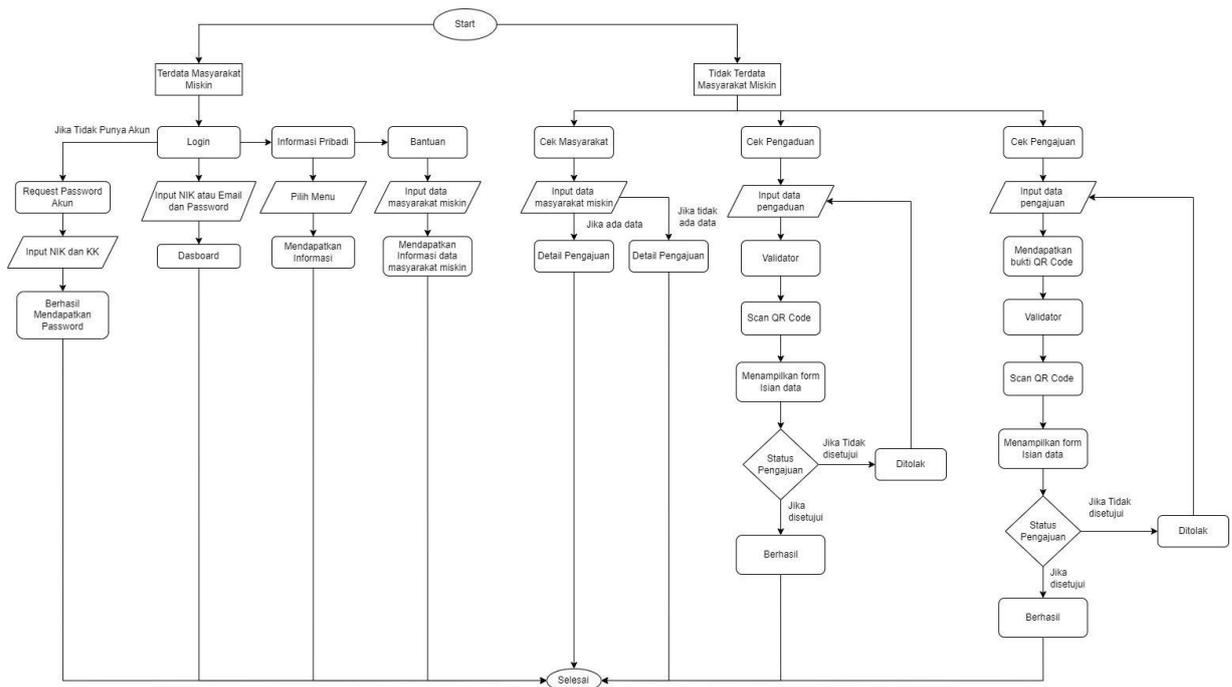
Metode Penelitian

Metode Penelitian ini satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara berurutan dan linear, mirip dengan aliran air (waterfall). Berikut adalah langkah-langkah utama dalam metodologi waterfall:

1. Requirements Gathering (Pengumpulan Persyaratan): Tahap

awal di mana kebutuhan dan persyaratan sistem diidentifikasi dan dikumpulkan dari stakeholder.

2. System Design (Perancangan Sistem): Persyaratan yang telah dikumpulkan diubah menjadi desain sistem yang spesifik, termasuk arsitektur perangkat lunak, desain database, dan spesifikasi detail lainnya.
3. Implementation (Implementasi): Tahap di mana kode perangkat lunak sebenarnya dibuat berdasarkan desain yang telah disetujui sebelumnya.
4. Testing (Pengujian): Setelah implementasi selesai, perangkat lunak diuji untuk memastikan bahwa itu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi persyaratan awal.
5. Deployment (Implementasi): Perangkat lunak dideploy ke lingkungan produksi atau digunakan oleh pengguna akhir.
6. Maintenance (Pemeliharaan): Setelah implementasi, perangkat lunak memerlukan pemeliharaan rutin untuk memperbaiki bug, memperbarui fitur, atau menanggapi masalah yang muncul



Gambar 1 Flowchart sistem

Hasil dan Pembahasan

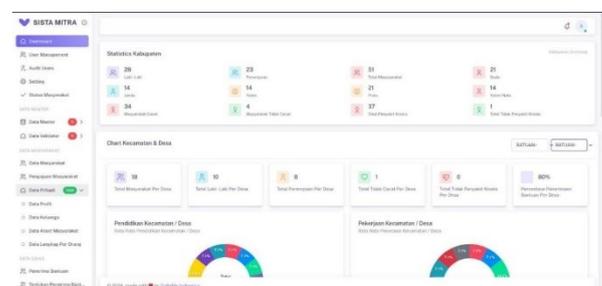
Hasil dari implementasi ini berupa website dan aplikasi android sistem informasi manajemen yang dimana sebagai pendataan masyarakat miskin atau masyarakat yang benar-benar tidak mampu yang pada akhirnya dapat memberikan transparansi dan dapat memberikan rekomendasi masyarakat tersebut termasuk dalam kategori miskin atau tidak. Website dan aplikasi android ini dapat diakses oleh administrator, operator-operator dinas terkait, validator dan masyarakat kabupaten sumenep.

Halaman awal sistem merupakan tampilan awal dari Sistem Informasi Manajemen Pendataan Garis Kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2 Halaman Awal Website

Halaman dashboard admin merupakan halaman website yang hanya dapat dikelola oleh admin. Dimana di dalam dashboard admin terdapat data master, data masyarakat, dan data pengaduan. Dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3 Halaman Utama Dashboard Admin

Halaman masyarakat merupakan halaman yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di kabupaten sumenep. Masyarakat disini dapat mengakses halaman cek masyarakat miskin di desanya, cek pengajuan dan cek pengaduan. Dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4 Halaman Awal Android

Halaman mobile dashboard masyarakat merupakan halaman yang dapat diakses oleh masyarakat tersebut secara pribadi setelah melakukan login. Masyarakat disini dapat mengakses pengaduan, pengajuan, status, bantuan, data pribadi, data keluarga, data asset dan data bantuan. Dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5 Halaman Dashboard Masyarakat

Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Manajemen untuk pendataan garis kemiskinan di Kabupaten Sumenep berhasil memberikan solusi dalam meningkatkan akurasi data dan transparansi distribusi bantuan. Sistem ini memungkinkan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan untuk mendapatkan bantuan secara adil dan tepat sasaran. Melalui integrasi dengan program kemiskinan daerah dan nasional, serta kolaborasi dengan lembaga penelitian, sistem ini dapat menjadi alat strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Sumenep secara berkelanjutan. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memperluas aksesibilitas di daerah terpencil dengan infrastruktur terbatas.

Daftar Pustaka

- Aipina, D., & Witriyono, H. (2022). Pemanfaatan Framework Laravel Dan Framework Bootstrap Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web. *Jurnal Media Infotama*, 18(1).
- Amalia, S., & Rahman, T. (2020). Strategi Mengatasi Tantangan dalam Pendataan Kemiskinan: Studi Kasus di Daerah Terpencil. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 11(2), 150-165.
- Astutik, D., & Santoso, D. B. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Timur Pendekatan Spasial. BPS. (2023).
- Choirudin, R., & Adil, A. (2019). Implementasi Rest Api Web Service dalam Membangun Aplikasi Multiplatform untuk Usaha Jasa. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 18(2), 284-293. <https://doi.org/10.30812/matrik.v18i2.407>
- Connolly, T., & Begg, C. (2010). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management. *Database Systems*.
- Fahrezi, K., Mulana, A. R., Melinda, S., Nurhaliza, N., & Mulyati, S. (2021). Penerapan Model Waterfall dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web sebagai Sistem Pengolahan Nilai Siswa. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v4i2.10196>
- Fajri, A. K. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica*, 7(1), 158-170. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158-170>
- Fansuri, F. (2015). *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*. 1. Hudi, F. C., & Karyanti, C. M. (2023). Pengujian Black Box Testing pada Sistem Informasi Assesment Berbasis WEB di Bidang Pariwisata. *Jurnal Ilmiah KOMPUTASI*.
- Irianto, I. (2014). Sistem Informasi Manajemen Manfaat Dan Tantangan. *Jurnal Valid*.
- Ivan, A. I. P., Arfandy, H., & Surasa, H. (2021). Pengembangan Servio Menggunakan Full Rest Api Untuk Mendukung Layanan Multiplatform. *Kharisma Tech*, 16(2), 15-22. <https://doi.org/10.55645/kharismatech.v16i2.108>

- Kaniya Pradnya Paramitha, I. A., Wiharta, D. M., & Arsa Suyadnya, I. M. (2022). Perancangan Dan Implementasi Restful Api Pada Sistem Informasi Manajemen Dosen Universitas Udayana. *Jurnal SPEKTRUM*, 9(3), 15. <https://doi.org/10.24843/SPEKTRUM.2022.v09.i03.p3>
- Lestari, I. T., & Imaningsih, N. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. *14(4)*, 739-746.
- Nasution, A. (2018). Penyelenggaraan Pengukuran Kemiskinan Di Badan Pusat Statistik: Pendekatan Teori Jejaring-Aktor. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 154-170. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.15>
- Ningrum, F. C., Suherman, D., Aryanti, S., Prasetya, H. A., & Saifudin, A. (2019). Pengujian Black Box pada Aplikasi Sistem Seleksi Sales Terbaik Menggunakan Teknik Equivalence Partitions. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 4(4), 125. <https://doi.org/10.32493/informatika.v4i4.3782>
- Prayoga, M. L., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135-142. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11058>